

FENOMENA ORANG KUAT LOKAL DI INDONESIA: STUDI KASUS TENTANG KEMUNCULAN KEDA DALAM EKSPLOITASI TAMBANG EMAS DI GUNUNG BOTAK KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Phenomenon of Local Strongmen in Indonesia: A Case Study about Keda's Emergence in Exploitation of Gold Mine in Botak Mountain of Buru Regency Maluku Province

Marcelino Solissa

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Email: marcelinosolissa@gmail.com

Abstract

This study elaborates the emergence of Local Strongmen phenomenon in Indonesia in the exploitation of gold mines in Botakmountain, Buru district, Maluku. The emergence of KEDA in responding to government policy in the closure of the illegal mine. The research shows that the actor who initially only in view as indigenous peoples in the area can become local strongmen because of mining activities in the Botak mountain. How the role of local bosses which arise and can control the mining activity. The ways in which local bosses intervene in government policy in closing illegal mining activities. Local bosses have succeeded in building strength by exploiting the weakness of the State in this case of building networks with related parties in formal and non formal institutions. The success of KEDA who builds the power of variants, the base as the owner of customary land, succeeds in mastering the miners who perform activities in the gold mine. KEDA successfully controls the economic development of the community with the existence of mining activities that always operate. Manipulation by local bosses to find the benefits of illegal mining activities.

Keywords: Local Strongmen, KEDA, Gold Mining

Abstrak

Kajian penulisan ini melihat tentang kemunculan fenomena *local Strongmen* atau orang kuat lokal di Indonesia dalam eksploitasi tambang emas di gunung botak kabupaten Buru Maluku. Kemunculan KEDA dalam merespon kebijakan pemerintah dalam penutupan tambang ilegal tersebut. Hasil penelitian tentang *local strongmen* menunjukkan bahwa aktor tersebut yang awalnya hanya di pandang sebagai masyarakat adat di daerah tersebut bisa menjadi orang kuat lokal karena adanya aktivitas pertambangan di gunung botak. Bagaimana peran bos-bos lokal yang muncul dan dapat mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut. Cara-cara yang dilakukan oleh para bos lokal mengintervensi kebijakan pemerintah dalam menutup aktivitas pertambangan ilegal. Bos-bos lokal berhasil membangun kekuatan dengan memanfaatkan kelemahan Negara dalam hal ini yaitu membangun jaringan dengan pihak-pihak yang terkait dalam institusi formal maupun non formal. Keberhasilan KEDA keda membangun kekuasaan varian, basis sebagai pemilik tanah adat, berhasil menguasai para penambang yang melakukan aktivitas di tambang emas. KEDA berhasil mengontrol pembangunan ekonomi

masyarakat dengan adanya aktivitas tambang yang selalu beroperasi. Manipulasi-manipulasi yang dilakukan bos lokal untuk mencari keuntungan dari aktivitas pertambangan illegal.

Kata Kunci: Orang Kuat Lokal, KEDA, Tambang Emas

PENDAHULUAN

Fenomena munculnya orang kuat lokal di Indonesia memasuki era baru pula dengan adanya sistem desentralisasi yang melibatkan banyak aktor, institusi, dan budaya lokal yang mulai bermunculan kembali dan memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal terorganisir, dan memiliki simbol lokal yang dibawa ke panggung politik. (Noordholt dan Klinken, 2007:1)

Kehadiran sistem desentralisasi melalui otonomi daerah menciptakan arena atau babak baru dari kontestasi pertarungan dan perseteruan kekuatan politik untuk saling menguasai di ranah lokal, sehingga banyak bermunculan elit-elit di tingkat lokal yang memanfaatkan kesempatan untuk terus mengakumulasikan dan mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya. Di samping itu juga, desentralisasi membuka peluang bagi para penguasa atau orang kuat lokal tumbuh dengan subur dan berkembang dengan cepat, serta memberikan warna dalam perpolitikan di berbagai daerah di Indonesia dan memanfaatkan peluang yang besar mengumpulkan kekayaan dan sumber daya yang ada.

Indonesia memiliki banyak daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Hal ini di dasarkan pada letak garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis dan juga berpengaruh terhadap suburnya alam di negeri ini. Kaitannya dengan barang tambang galian (emas) atau yang sumber daya mineral lainnya, tentunya hal ini bukan hal yang tabu. Sebab, sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber daya mineral ini memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, dengan semua kecakapan yang dimiliki serta kemajuan IPTEK, maka manusia sudah sepatutnya melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan nilai guna, sehingga bisa lebih memberikan manfaat. Emas merupakan komoditi yang sangat menjanjikan bagi semua kalangan. Perkembangan masyarakat di zaman ini ditandai dengan upaya untuk bisa menguasai seluruh aspek tatanan kehidupan orang lain. Seperti memonopoli kepentingan dan dapat mengambil keuntungan jika ada kesempatan yang bisa untuk digunakan.

Hal yang dikaji dalam tulisan ini yakni menjelaskan kemunculan aktor-aktor di tingkat lokal dalam memperebutkan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yakni kemunculan KEDA dalam eksploitasi tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Maluku. Tulisan ini menarik untuk dipahami lebih lanjut, karena dampak desentralisasi melalui otonomi daerah yang diberikan pemerintah dengan maksud memberi ruang partisipasi seluas-luasnya bagi daerah, justru menjadi permasalahan baru.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa studi kasus *local strongman*. Metode studi kasus menyajikan secara rinci mengenai satu subjek atau kasus di suatu daerah yang diteliti secara intensif yang didasarkan pada pengamatan langsung, dokumen yang bersangkutan termasuk literatur dan berita yang faktual dan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Orang Lokal Dalam Aktivitas Pertambangan di Gunung Botak

Pulau Namlea merupakan ibukota kabupaten Buru yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam. Salah satunya adalah tambang emas Gunung Botak yang terletak di Desa Wamsai, Kecamatan Waeapo. Awal mulanya kawasan Gunung Botak hanyalah hamparan bukit yang ditumbuhi pohon kayu putih yang dikelola oleh masyarakat Desa Wamsait menjadi produk minyak kayu putih yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di daerah ini yang berprofesi sebagai petani pohon kayu putih dan pengolah minyak kayu putih.

Lokasi Gunung Botak ini awalnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk bertani dan berkebun, namun dengan adanya penemuan emas yang dilakukan secara tidak sengaja oleh masyarakat setempat, sehingga perlahan-lahan masyarakat di sekitar daerah ini mulai melakukan aktivitas pencarian emas yang terdapat di sekitar areal Gunung Botak sebagai penggali dan pendulang emas dengan memakai alat dulang sederhana dari kuali (penggorengan) yang dibelinya dari pasar, kemudian menjualnya kepada para penadah. Selain masyarakat adat Desa Wamsait terdapat juga pencari emas yang datang dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku.

Keberadaan tambang emas di Gunung Botak kemudian memunculkan kembali kekuatan orang-orang biasa yang memiliki hak atas tanah adat atau petuanan, misalnya kepala adat, tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat setempat. Kepala adat dan tokoh-tokoh adat awalnya hanya melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengurus batas tanah, melakukan upacara adat, menyelesaikan sengketa-sengketa adat, perkawinan adat serta administrasi-administrasi adat lainnya. Namun, dengan adanya tambang emas di Gunung Botak mereka secara tidak langsung bertransformasi menjadi orang kuat lokal atau *local strongmen* yang disebut sebagai KEDA, serta mempunyai kewenangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah adat dan aktivitas tambang emas.

Kemunculan KEDA sebagai orang kuat lokal mendominasi eksploitasi tambang emas di Gunung Botak. Keberadaan orang kuat lokal dapat dikatakan sebagai elit yang memberikan pengaruh sangat besar dalam proses penambangan. KEDA memiliki tanah yang mengandung emas, sehingga mempunyai kekuasaan dalam memberikan ijin serta mempekerjakan para penambang untuk menambang emas. Hal ini menyebabkan perannya semakin penting dalam Desa dan lokasi tambang emas tersebut.

John T. Sidel (1999) mengkaji fenomena orang kuat lokal di tiga negara, yakni: Filipina, Thailand dan Indonesia ingin menunjukkan bahwa pola kekuasaan orang kuat lokal di dunia ketiga bukanlah semata-mata tentang kekuatan dan ketahanan dari hubungan patron-klien dan elit pemilik tanah, tetapi lebih pada mewakili keganjilan struktur kelembagaan negara. Sidel ingin membuktikan bahwa bahwa keberadaan para bos lokal tidak selalu merintangai pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan Migdala (1988) dalam melihat Filipina.

Migdala (1988) mengungkapkan bahwa dalam menciptakan kekuasaannya, para bos lokal berhasil dengan memaksimalkan beberapa variasi pola. Pertama, mereka mendapatkan ijin kontrol monopolitis berupa kegiatan ilegal, transportasi, tanah-tanah pemerintah, perdagangan dan industri. Mereka membangun aliansi dengan para penguasa ekonomi politik lokal yang sepertinya punya akses besar dalam kekuasaan lokal. Kedua, jika kontrol dan kekuasaan negara terlalu besar dan monopolitis, para bos-bos lokal menggunakan gaya preman/kekerasan untuk mempertahankan hidup mereka. Kekerasan dipakai guna membangun daya tawar terhadap kekuasaan lokal resmi. Ketiga, jika kontrol pembangunan ekonomi berada di luar pemerintah yakni

pemiliki modal mereka tetaplah melakukan perlawanan dan berhasil menciptakan dinasti. Mereka mewariskan kekuasaan kepada generasi penerusnya.

Hal ini semua menurut pengamatan Migdala (1988) tidak terlepas dari langkah-langkah besar yang dilakukan oleh para bos lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Fenomena ini menunjukkan langkah lebih maju dibandingkan Filipina saat berada di bawah rezim otoriter yang menjadikan sistem pemerintahan yang jauh lebih terpusat dan otonom dari pengaruh masyarakat, yang akhirnya Filipina mengalami kemunduran dramatis pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Sedangkan, Sidel (1999) melihat bahwa para bos lokal yang memperoleh kekuasaan dan kekayaan bukanlah dari kepemilikan tanah pribadi tetapi dari sumber-sumber negara dan perdagangan, dan banyak dari mereka golongan politikus dan elit bertanah itu yang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan termasuk pemilikan tanah besar justru didapatkan setelah mereka memasuki atau menduduki jabatan, dan bukan sebelumnya.

Peran mereka semakin tidak terkendali dan liar, namun sistematis. Dengan begitu cepatnya, mereka melebarkan sayap dengan memaksimalkan pengaruh. Mereka berhasil mengumpulkan pengikut setia. Selanjutnya, mereka membangun kedekatan dengan pejabat negara. Modal sosial dan ekonomi begitu besar yang dimiliki membuat posisi mereka strategis. Dalam membangun negosiasi dan pengelolaan aset ekonomi, kelincahan mereka tercermin dari konsensus yang berhasil dibangun dengan pejabat negara. Mutualisme terbangun, pejabat negara memperoleh dukungan modal dan kekuatan sosial, begitupun sebaliknya orang kuat lokal memperoleh konsensi pengelolaan aset ekonomi. Orang kuat lokal atau *local strongmen* ini diasosiasikan seperti para pebisnis, preman, dan lain-lain.

Orang Kuat Lokal Bertahan Hidup

Tabel 1. Perbandingan Orang Kuat Lokal Menurut Migdal dan Sidel

Perbandingan	Joel S. Migdal	John T. Sidel
Istilah	<i>Local Strongmen</i>	<i>Local Bossism</i>
Aktor	Kepala suku, Tuan Tanah, Pimpinan Tradisional Dll	Kepala daerah, anggota dewan, pengusaha Dll.
Perspektif	Historis kultural	Struktural
Latar Belakang Ekonomi	Selalu Orang Kaya	Tidak Selalu Orang Kaya

Proses Pembentukan	Fragmentasi masyarakat Independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka	Kegagalan pemerintah Memberikan kesejahteraan rakyat.
Aktor	Tuan Tanah, Kepala Suku, Panglima Perang, Pemimpin Klan, Pemimpin Tradisional	Kepala Daerah, Legislator Mantan Komandan Militer, Pengusaha.
Cara Bertahan Hidup Aktor	Memanfaatkan hubungan patron klien, orang kuat lokal, politisi dan birokrat.	Mengandalkan dukungan investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalistik

Pandangan yang sama juga dilontarkan oleh Erwiza Erman (2009) tentang lahirnya *Shadow State* (Negara Bayangan) yang juga bisa menjadi cikal bakalnya hadirnya *Local Strongmen* dengan adanya perkara gelap penambangan ilegal yang terjadi di Bangka Belitung, aktivitas ekonomi legal dan ilegal ‘mencuri menjual’ telah meningkat dan semakin memperlihatkan wajah yang kompleks sejak era desentralisasi. Adanya pluralitas regulasi dan regulator yang mengklaim diri mereka sendiri sebagai ‘*you say illegal we say legal*’ dalam konteks kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah mengindikasikan menjadi penyebab kompetisi antara aktor-aktor tersebut. Hal ini dikarenakan adanya desentralisasi kekuasaan yang setengah hati. Jika di lihat dari praktik ekonomi ilegal dan legal di jalankan ternyata, pengusaha ilegal dan aktor-aktor pemerintah juga terlibat dalam aktifitas ilegal. Gejala ini bukanlah tipikal dalam bisnis timah di Bangka saja, melainkan juga terjadi di India sebagaimana kajian Barbara Hariris White.

Vedi Hadis mengatakan bahwa dengan adanya sistem desentralisasi di Indonesia memberikan sebuah jalan atau dengan kata lain memberi kesempatan bagi orang kuat lokal hadir dan bangkit dalam desentralisasi di Indonesia. Hadis menggunakan istilah oligarki lokal atau bos lokal yang mempunyai makna yang hampir sama dengan orang kuat kokal. Ia melihat bahwa faktor struktural yang memunculkan atau membangkitkan bentuk khusus oligarki politik-bisnis di Indonesia, terutama bagaimana otoritas Negara dan kepentingan borjuis secara historis tumbuh berinteraksi, dan berpadu semasa orde baru. Otoritas Negara dan borjuis di Indonesia berubah dari bentuk barnopati pada masa awal pemerintahan Soeharto menjadi bentuk oligarkis pada akhir orde baru. Negara

ditransformasikan menjadi Negara yang di tentukan oleh perpaduan kekayaan dan kekuasaan politik birokratis yang diartikulasikan dalam hubungan dan pembauran antara keluarga-keluarga pengusaha terkemuka dengan keluarga politikus dan birokrasi begitu mereka terlibat langsung dalam kepemilikan dan penguasaan modal.

Banyak di antara oligarki lokal yang berhasil membentuk kembali diri sebagai anggota parlemen dan pemimpin partai politik serta menempa bentuk persekutuan baru dengan kepentingan pengusaha lokal, pemimpin organisasi kemasyarakatan lama maupun baru dan bahkan terkadang dengan militer atau polisi. Banyak bekas politikus pengusaha, dan unsur-unsur kriminal, memanfaatkan perluasan dengan desentralisasi pemerintahan itu dengan membentuk identitas politik baru¹

Respon Orang Kuat Lokal terhadap Lembaga Formal

Upaya penertiban tambang rakyat dan tambang ilegal itu sudah berulang kali dilakukan. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya pada Februari 2013, pernah meminta Gubernur Maluku untuk menutupnya karena tambang itu mencemari lingkungan: kandungan merkuri sisa pengolahan sudah melewati ambang batas. Permintaan Menteri dijawab dengan pernyataan bahwa sejak 2012 tambang sudah resmi ditutup, tapi, penambang emas terus membandel dan terus melakukan aktivitas seperti biasa dalam lingkungan tambang di Gunung Botak².

Bupati Buru tentu pusing juga dibuatnya Karenanya, sebuah solusi pun dibuat. Pada 21 April 2012 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan. Lewat Perda dan Peraturan turunannya para penambang emas ilegal bisa menjadi penambang legal jika memiliki izin WPR (Wilayah Penambangan Rakyat). Izin WPR ini bisa diberikan kepada koperasi. Karenanya, sejak Mei 2012, Bupati giat mensosialisasikan pembentukan koperasi tambang emas. Jumlah penambang yang saat itu sudah mencapai 14.000 orang akan dikelompokkan ke dalam beberapa koperasi. Luas area tambang yang sudah mencapai 125 hektar diupayakan untuk di bagi rata ke tiap koperasi.

¹Vedi R Hadis dan Richard Robison 2014. *Ekonomi Politik Oligarky dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia*. Prisma Jurna Vol 33 no 1 Cornell Modern Indonesia Project. Jakarta.
orang kuat lokal” di Thailand dan Filipina dan jaringan dan mesin politik brutal dengan melakukan kekerasan politik seperti pembunuhan politik yang marak terjadi di Filipina dan Thailand, kurang terlibat dalam aktivitas ekonomi illegal.

²Tribun Maluku, 16 januari 2016.

Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses penutupan tambang emas yang ada di Gunung Botak tetapi yang terjadi adalah kegiatan pertambangan masih saja terjadi seperti biasa³. Ini terlihat jelas bahwa pengaruh orang kuat lokal atau para bos lokal memiliki pengaruh yang cukup kuat. Lembaga informal berhasil diberdayakan oleh para bos lokal yang ada di Gunung Botak.

Berbagai kebijakan di antaranya peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemda sebagai lembaga formal yang ada di daerah masih saja bisa dipengaruhi oleh aktor *local strongmen* dengan berbagai cara yang dilakukan. Proses penutupan tambang mendapat respon dari orang kuat dengan memanfaatkan jejaring yang dilakukan untuk melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun dengan membangun sistem patron-klien yang dilakukan dengan oknum-oknum lembaga informal.

Keterlibatan orang kuat lokal dalam mengambil alih fungsi dan legitimasi dari lembaga formal membuat mereka menjadi kuat dan berkuasa dalam aktivitas pertambangan yang ada di Gunung Botak. Berbagai cara yang dilakukan demi mendapatkan kekuasaan yang dilakukan oleh bos-bos lokal ini sehingga memberikan warna yang baru dalam pemahaman orang kuat lokal. Elite lokal merespon kebijakan pemerintah dengan melawan kebijakan dalam penutupan tambang emas di gunung botak. KEDA hadir dan mengkoordinir masyarakat sekitar sebagai basis kekuasaan. Strategi KEDA yaitu dengan menjaring masyarakat lokal untuk melakukan perlawanan⁴.

Perlawanan KEDA dalam merespon kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan jejaring dan juga tindakan pemaksaan dan kekerasan. Perda kabupaten Buru hanya dipandang sebagai aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa untuk mengendalikan dalam proses penutupan tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru, Maluku. Kesulitan Pemda dalam penutupan tambang emas di Gunung Botak karena terlalu banyak kepentingan yang ada dalam aktivitas pertambangan tersebut, ditambah lagi kekuatan lokal yang mendominasi dalam proses penutupan tambang emas. Perlawanan bos lokal dengan memanfaatkan kekuatan yang telah dibangun untuk melawan Pemda dengan cara demo penolakan penutupan tambang emas di gunung botak⁵.

³Metro TV, 26, November 2015.

⁴NET TV. 14 November 2015.

⁵ Wawancara Live Merto TV dengan Bupati Buru Ramly Umasugi, 15 november 2015.

Sidel meletakkan gagasan utamanya pada Fenomena Boosisme dengan studi kasus di tiga negara. Beberapa perbedaan yang ditemui terkait waktu dan metode dianggap wajar karena struktur kekuasaan dan masyarakat yang berbeda. Meskipun tentunya ada beberapa kemiripan. Konsep Boosisme Sidel cukup lugas untuk membaca peta politik Indonesia kemarin dan akan datang. Desentralisasi kekuasaan yang bergerak secara cepat melahirkan raja-raja baru di aras lokal yang dinamakan bos lokal. Di beberapa daerah kehadiran mereka sudah terasa. Analisa Sidel selain bisa membantu memahami sejarah eksistensi bos-bos lokal dalam politik Indonesia, juga bisa membantu kita dalam memahami konsep bekerjanya dalam demokrasi kontemporer. Penjelasan Sidel mengenai modus bekerja orang kuat lokal ini melalui pemilu dan pemilukada dengan variannya seperti kekerasan, intimidasi, jaringan patron-klien, maupun aliansi dengan birokrat akan banyak membantu dalam menjelaskan demokratisasi di Indonesia. Munculnya istilah pembajakan demokratisasi lokal oleh elit bisa dilihat dari kacamata Sidel ini. Boosisme berbeda dengan elit lokal, gagasan ini memiliki kekuatan pengaruh lebih besar daripada elit lokal. Banyak elit-elit lokal seperti Ulama, bupati, dan lain-lain namun belum tentu menjadi orang kuat lokal. Tergantung sejauh mana pengaruhnya bisa bekerja. Berbagai macam varian yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh para bos-bos lokal dengan cara kekerasan yang memobilisasi kekuatan yang ada, diantaranya dengan demo penolakan penutupan aktivitas pertambangan yang ada di Gunung Botak. Patron klien antara bos-bos lokal dengan aktor-aktor tertentu yang mencari keuntungan dan mendapat bagian dari proses pertambangan yang ada di Gunung Botak.

KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan penambangan ilegal yang terjadi di Gunung Botak Kabupaten Buru Maluku, terlihat jelas bagaimana peran bos-bos lokal yang muncul dan dapat mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut. Cara-cara yang dilakukan oleh para bos lokal mengintervensi kebijakan pemerintah dalam menutup aktivitas pertambangan ilegal. Bos-bos lokal berhasil membangun kekuatan dengan memanfaatkan kelemahan Negara dalam hal ini membangun jaringan dengan pihak-pihak yang terkait dalam institusi formal maupun non formal untuk kepentingan kelompok. Sehingga, KEDA berhasil menanamkan pengaruh atas para penambang yang

melakukan aktivitas di tambang emas. KEDA berhasil mengontrol pembangunan ekonomi masyarakat dengan adanya aktivitas tambang yang selalu beroperasi. Manupulasi-manipulasi yang dilakukan bos lokal untuk mencari keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal, pemanfaatan kekuatan patron-klien hingga membangun jaringan dengan berbagai lapisan masyarakat membuat bos lokal semakin kuat sehingga menyulitkan lembaga formal dalam melakukan proses penutupan tambang ilegal tersebut. Dengan demikian kehadiran para bos lokal dalam aktivitas tambang ilegal memberikan dampak yang kuat dan mereka berada dalam posisi sebagai pemenang dalam mengambil alih aktivitas pertambangan di Gunung Botak. Peranan orang-orang kuat lokal tidak lagi dapat dibendung, namun demikian kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berkiprah di politik lokal perlu dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Barbara Harris White. 2003. *How India works: The character of the Local Economy*. Cambridge: Commonwealth lectures.

BBC Indonesia. 2015. Penutupan gunung Botak, tambang emas legal akan dibangun - http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151118_indonesia_gunungbotak_emas, di akses pada 23 Januari 2016.

Erman, Erwiza. 2009. *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kompas. 2015. Petambang Gunung Botak Melawan Petugas - <http://print.kompas.com/baca/2015/11/14/Petambang-Gunung-Botak-Melawan-Petugas>, di akses pada 17 Februari 2016.

Migdal, Joel S. 1988. *Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Hadis, Vedi R. dan Richard Robison. 2014. *Ekonomi Politik Oligarky dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia*. Prisma Jurnal Vol 33 No 1.

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sidel, John. 1999. *Capital, Coercion and Crime: Bossism in the Philippines*. Stanford: Stanford University Press.

Tribun Maluku. 2015. Pekan Depan Tambang Gunung Botak Ditutup - <http://www.tribun-maluku.com/2015/09/pekan-depan-tambang-gunung-botak-ditutup.html>, di akses pada September 2015.